



# KEBIJAKAN PUBLIK

Bakri La Suhu, S.IP.,M.A



# Tentang Penulis



**Bakri La Suhu, S.IP, M.A.**, Lahir di Pulau Obi khususnya Desa Mano Kecamatan Obi Selatan Kabupaten Halmahera Selatan pada tanggal 14 Mei 1985. Menamatkan jenjang Pendidikan Dasar pada SD Negeri Mano-Obi Selatan Tahun 1998, MTs Alkhairaat Mano-Obi Selatan Tahun 2001, MAN Model Ternate Tahun 2004. Menyelesaikan pendidikan tinggi Strata Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Maluku Utara Tahun 2008 dan melanjutkan Program Magister (S-2) Jurusan Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta (2010-2011).

Pada tahun 2012, penulis kembali mengabdikan sebagai Dosen dan kemudian tahun 2013 diangkat sebagai Dosen Tetap pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Maluku Utara. Tahun 2018 hingga sekarang, penulis dipercayakan untuk menduduki jabatan sebagai Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Program Magister Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Maluku Utara



eureka  
media alurero

Anggota IKAPI  
No. 225/JTE/2021

0858 5343 1992  
eurekamediaaksara@gmail.com  
Jl. Banjaran RT.20 RW.10  
Bojongsari - Purbalingga 53362

ISBN 978-623-487-860-8



9 786234 878608

# KEBIJAKAN PUBLIK

Bakri La Suhu, S.IP., M.A



**eureka**  
**media aksara**

PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA

## KEBIJAKAN PUBLIK

**Penulis** : Bakri La Suhu, S.IP., M.A

**Editor** : Abdullah Kaunar  
Bakri La Suhu

**Desain Sampul** : Ardyan Arya Hayuwaskita

**Tata Letak** : Meuthia Rahmi Ramadani

**ISBN** : 978-623-487-860-8

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA,**  
**MARET 2023**  
**ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH**  
**NO. 225/JTE/2021**

### **Redaksi:**

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan  
Bojongsari Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekamediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2023

### **All right reserved**

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

## KATA PENGANTAR

Pada tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, permasalahan seringkali terjadi silih berganti, mulai dari permasalahan dalam negeri hingga pada permasalahan luar negeri. Tentu, permasalahan-permasalahan tersebut sangat memerlukan suatu kebijakan dari pemerintah sehingga dapat meminimalisir berbagai permasalahan yang terjadi. Risalah buku ini hadir sebagai bentuk perwujudan karya penulis untuk mengedepankan teori dan konsep untuk menjawab permasalahan yang terjadi pada kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara.

Kebijakan publik yang akan pelajari dan dipahami oleh para pembaca, tentunya dapat melahirkan beberapa kebijakan yang berkualitas sehingga mampu menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi oleh publik. Buku ini memiliki tujuan khusus antara lain dapat membantu para mahasiswa untuk mengetahui dengan seksama mata kuliah kebijakan publik, sedangkan tujuan umum untuk para peminat kebijakan publik agar bisa mendalami konsep dan teori dari kebijakan.

Buku ini terdiri dari beberapa Pokok-pokok Bahasan, yang penulis jelaskan secara saksama yang berkaitan dengan kebijakan publik. Pada BAB I : KONSEP DASAR KEBIJAKAN (*PUBLIC POLICY*) terdiri dari ; Pendahuluan, Pengertian Kebijakan (*Policy*) & Ruang Lingkup Kebijakan Publik, Teori Pembuatan Keputusan dan Masalah Publik. BAB II : ISSUE-ISSUE DALAM KEBIJAKAN PUBLIK (*PUBLIC POLICY*) terdiri dari ; Pendahuluan dan Menciptakan dan Mengembangkan Issue. BAB III :

PERENCANAAN KEBIJAKAN PUBLIK (*PUBLIC POLICY PLANNING*) terdiri dari ; Agenda (*Settting*) Kebijakan dan Jenis-jenis Agenda (*Setting*) Kebijakan. BAB IV : PROSES PEMBUATAN KEBIJAKAN & PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK (*POLICY FORMULATION*) terdiri dari ; Pembentukan Kebijakan Versus Perumusan Kebijakan Publik, Aktor-Aktor Terlibat dalam Perumusan Kebijakan Publik, Interaksi Antar Aktor dalam Proses Agenda Setting, Hakekat, Variasi dan Tingkatan-tingkatan Kebijakan Publik, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perumusan dan Pembuatan Kebijakan, dan Tahap-Tahap Kebijakan Publik.

Selanjutnya pada BAB V : IMPLEMENTASI & ANALOGI KEBIJAKAN PUBLIK (*PUBLIC POLICY*) terdiri dari ; Konsep Implementasi, Kebijakan-kebijakan yang cenderung menghadapi Masalah, Analogi *Public Policy* dan Sistem Kebijakan Publik. BAB VI : PROSES ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK (*PUBLIC POLICY*) terdiri dari ; Prosedur Proses Analisis Kebijakan Publik dan Gaya Analisis Kebijakan (*Styles Of Policy Analysis*). BAB VII : EVALUASI DAN DAMPAK KEBIJAKAN PUBLIK (*PUBLIC POLICY*) terdiri dari ; Evaluasi Kebijakan Publik, Dampak Kebijakan Publik, dan Kebijakan Publik Melahirkan Konflik-konflik Kecenderungan. BAB VIII : KEBIJAKAN DALAM SITUASI DARURAT BENCANA terdiri dari ; Dasar Hukum, Jenis-Jenis Bencana dan Tahapan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Karya Buku yang sederhana ini bagian dari karya penulis dalam bentuk pikiran-pikiran dan hasil analisis yang berkaitan dengan kebijakan publik. Tentu karya buku ini masih jauh dari sempurna, olehnya itu saran dan kritikan

dari para pembaca sangat diharapkan demi penyempurnaan karya buku selanjutnya. Semoga bisa bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan, Aamiin.

Ternate, Maret 2023

Penulis  
**Bakri La Suhu, S.IP.,M.A**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi</b>
<b>BAB 1 KONSEP DASAR KEBIJAKAN (<i>PUBLIC POLICY</i>)</b> .....	<b>1</b>
A. Pendahuluan.....	1
B. Pengertian Kebijakan ( <i>Policy</i> ) & Ruang Lingkup Kebijakan Publik .....	5
C. Teori Pembuatan Keputusan.....	15
D. Masalah Publik .....	20
<b>BAB 2 ISSUE-ISSUE DALAM KEBIJAKAN PUBLIK (<i>PUBLIC POLICY</i>)</b> .....	<b>23</b>
A. Pendahuluan.....	23
B. Menciptakan dan Mengembangkan Issue .....	32
<b>BAB 3 PERENCANAAN KEBIJAKAN PUBLIK (<i>PUBLIC POLICY PLANNING</i>)</b> .....	<b>36</b>
A. Agenda ( <i>Setting</i> ) Kebijakan .....	36
B. Jenis-Jenis Agenda ( <i>Setting</i> ) Kebijakan.....	37
<b>BAB 4 PROSES PEMBUATAN KEBIJAKAN &amp; PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK (<i>POLICY FORMULATION</i>)</b> .....	<b>40</b>
A. Pembentukan Kebijakan Versus Perumusan Kebijakan Publik .....	40
B. Aktor-Aktor Terlibat dalam Perumusan Kebijakan Publik .....	41
C. Interaksi Antar Aktor dalam Proses Agenda Setting .....	42
D. Hakekat, Variasi dan Tingkatan-Tingkatan Kebijakan Publik .....	50
E. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perumusan dan Pembuatan Kebijakan .....	53
F. Tahap-Tahap Kebijakan Publik.....	55



<b>BAB 5 IMPLEMENTASI &amp; ANALOGI KEBIJAKAN PUBLIK (<i>PUBLIC POLICY</i>)</b> .....	<b>57</b>
A. Konsep Implementasi .....	57
B. Kebijakan-kebijakan yang Cenderung Menghadapi Masalah .....	76
C. Analogi <i>Public Policy</i> .....	82
D. Sistem Kebijakan Publik .....	84
<b>BAB 6 PROSES ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK (<i>PUBLIC POLICY</i>)</b> .....	<b>86</b>
A. Prosedur Proses Analisis Kebijakan Publik .....	86
B. Gaya Analisis Kebijakan ( <i>Styles Of Policy Analysis</i> ) .....	94
<b>BAB 7 EVALUASI DAN DAMPAK KEBIJAKAN PUBLIK (<i>PUBLIC POLICY</i>)</b> .....	<b>97</b>
A. Evaluasi Kebijakan Publik.....	97
B. Dampak Kebijakan Publik .....	105
C. Kebijakan Publik Melahirkan Konflik-Konflik Kecenderungan.....	106
<b>BAB 8 KEBIJAKAN DALAM SITUASI DARURAT BENCANA</b> .....	<b>110</b>
A. Pendahuluan .....	110
B. Jenis-Jenis Bencana .....	112
C. Tahapan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana .....	116
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>120</b>
<b>TENTANG PENULIS</b> .....	<b>124</b>



# **KEBIJAKAN PUBLIK**

**Bakri La Suhu, S.IP.,M.A**



# BAB

# 1

## KONSEP DASAR KEBIJAKAN (*PUBLIC POLICY*)

### A. Pendahuluan

Istilah kebijakan atau kebijakan publik sudah sering kita dengar melalui berbagai media massa (baik melalui surat kabar, televisi, ataupun internet) maupun dalam pembicaraan sehari-hari. Istilah tersebut sering dikaitkan dengan bidang tertentu misalnya kebijakan ekonomi, kebijakan pendidikan, kebijakan tenaga kerja, dan lainnya; atau dibicarakan ketika dikaitkan suatu persoalan (masalah) yang terjadi dalam kehidupan kita, misalnya kebijakan pembinaan pedagang kaki lima, kebijakan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, kebijakan pemberdayaan masyarakat, dan lain-lain.

Seringkali, ketika ada suatu masalah dalam kehidupan masyarakat, maka banyak yang mempertanyakan “bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatasinya?” Masyarakat sering mendiskusikan, mengkritisi, atau mempertanyakan berbagai isu kebijakan seperti pendidikan mahal, krisis ekonomi yang tidak kunjung habis, kualitas pelayanan publik yang buruk, beras raskin yang tidak sampai sasaran. Bahkan tanpa disadari, sering dipersoalkan

# BAB 2

## ISSUE-ISSUE DALAM KEBIJAKAN PUBLIK (*PUBLIC POLICY*)

### A. Pendahuluan

Pada bagian ini, anda akan mempelajari konsep isu kebijakan publik dan dinamikanya dalam pembuatan kebijakan. Untuk itu, kita akan membagi uraian ini menjadi tiga bagian yaitu pada bagian pertama kita akan mempelajari makna isu kebijakan dan dinamikanya. Kemudian pada bagian kedua kita akan mempelajari kriteria isu yang dapat menjadi agenda kebijakan publik. Dan bagian yang ketiga kita akan mempelajari pengaruh distribusi kekuasaan terhadap isu kebijakan.

Isu kebijakan publik sangat penting dibahas untuk membedakan istilah yang dipahami awam dalam perbincangan sehari-hari yang sering diartikan sebagai "kabar burung". Isu dalam sebuah kebijakan sarat memiliki lingkup yang luas yang meliputi berbagai persoalan yang ada di tengah masyarakat. Oleh karenanya memahami konsep isu sangat akan sangat membantu para analis dalam menganalisis kebijakan publik.

# BAB 3

## PERENCANAAN KEBIJAKAN PUBLIK (*PUBLIC POLICY PLANNING*)

### A. Agenda (*Setting*) Kebijakan

Agenda kebijakan didefinisikan sebagai tuntutan-tuntutan agar para pembuat kebijakan memilih atau merasa terdorong untuk melakukan tindakan tertentu. Dengan demikian, maka agenda kebijakan dapat dibedakan dari tuntutan-tuntutan politik secara umum serta dengan istilah “prioritas” yang biasanya dimaksudkan untuk merujuk pada susunan pokok-pokok agenda dengan pertimbangan bahwa suatu agenda lebih penting dibandingkan dengan agenda yang lain.

Barbara Nelson dalam Budi Winarno (2002:59), menyatakan bahwa proses agenda kebijakan berlangsung ketika pejabat publik belajar mengenai masalah-masalah baru, memutuskan untuk memberi perhatian secara personal dan memobilisasi organisasi yang mereka miliki untuk merespon masalah tersebut. Dengan demikian, agenda kebijakan pada dasarnya merupakan pertarungan wacana yang terjadi dalam lembaga pemerintah. Ini bila kebijakan kita definisikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah.

# BAB

# 4

## PROSES PEMBUATAN KEBIJAKAN & PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK (*POLICY FORMULATION*)

### A. Pembentukan Kebijakan Versus Perumusan Kebijakan Publik

Kedua konsep ini, pembentukan kebijakan dan perumusan kebijakan sekilas merupakan konsep yang miring, namun sebenarnya keduanya merupakan konsep yang sama sekali berbeda walaupun antara keduanya tidak dapat dipisahkan secara tegas. Proses pembuatan kebijakan publik (*policy formulation*) melibatkan aktivitas pembuatan keputusan yang cenderung mempunyai percabangan yang luas, mempunyai perspektif jangka panjang dan penggunaan sumber daya yang kritis untuk meraih kesempatan yang diterima dalam kondisi lingkungan yang berubah (Frank T. Paine dan William Naumes dalam Leo Agustino, 2008:91-92). Pembentukan kebijakan merupakan proses sosial yang dinamis dengan proses intelektual yang lekat di dalamnya. Ini berarti bahwa proses pembentukan kebijakan merupakan suatu proses yang melibatkan proses-proses sosial dan proses-proses intelektual yang saling terkait antara satu dengan lainnya. Pembentukan kebijakan hendaknya memperhatikan aspek-aspek sosial dalam kehidupan

# BAB

# 5

## IMPLEMENTASI & ANALOGI KEBIJAKAN PUBLIK (*PUBLIC POLICY*)

### A. Konsep Implementasi

Studi implementasi merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan. Untuk melukiskan kerumitan dalam proses implementasi tersebut dapat dilihat pada pernyataan yang dikemukakan oleh seorang ahli studi kebijakan Eugene Bardach (1991:3) dalam Leo Agustino (2008:138) yaitu :

“adalah cukup untuk membuat sebuah program dan kebijakan umum yang kelihatannya bagus diatas kertas. Lebih sulit lagi merumuskannya dalam kata-kata dan slogan-slogan yang kedengarannya mengenakan bagi telinga para pemimpin dan pemilih yang mendengarkannya. Dan lebih sulit untuk melaksanakannya dalam bentuk cara yang memuaskan semua orang termasuk mereka anggap klien”.

# BAB 6

## PROSES ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK (*PUBLIC POLICY*)

### A. Prosedur Proses Analisis Kebijakan Publik

Proses analisis kebijakan adalah serangkaian aktivitas *intelektual* yang dilakukan di dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat *politis*. Aktivitas politis tersebut dijelaskan sebagai *proses pembuatan kebijakan* dan divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung yang diatur menurut urutan waktu: penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. Analisis kebijakan dapat menghasilkan informasi yang relevan dengan kebijakan pada satu, beberapa, atau seluruh tahap dari proses pembuatan kebijakan, tergantung pada tipe masalah yang dihadapi klien yang dibantunya.

Menurut E.S. Quade, analisis kebijakan publik adalah suatu bentuk penelitian terapan yang dilakukan untuk memahami secara mendalam berbagai masalah sosial guna mendapatkan pemecahan yang lebih baik. Sedangkan menurut Stuart S. Nagel, analisis kebijakan publik adalah penentuan dalam rangka hubungan antara berbagai alternatif kebijakan & tujuan-tujuan kebijakan



# BAB

# 7

## EVALUASI DAN DAMPAK KEBIJAKAN PUBLIK (*PUBLIC POLICY*)

### A. Evaluasi Kebijakan Publik

Istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assessment*), kata-kata yang menyatukan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, *evaluasi* berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat kebijakan. Ketika hasil kebijakan pada kenyataannya mempunyai nilai, hal ini karena hasil tersebut memberi sumbangan pada tujuan atau sasaran. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa kebijakan atau program telah mencapai tingkat kerja yang bermakna, yang berarti bahwa masalah-masalah kebijakan dibuat jelas atau diatasi (William N. Dunn, 2003:608)

# BAB

# 8

## KEBIJAKAN DALAM SITUASI DARURAT BENCANA

### A. Pendahuluan

Negara kesatuan Republik Indonesia memiliki wilayah yang luas dan terletak digaris khatulistiwa pada posisi silang antara dua benua dan dua samudra dengan kondisi alam yang memiliki berbagai keunggulan, namun dipihak lain posisinya berada dalam wilayah yang memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang rawan terhadap terjadinya bencana dengan frekwensi yang cukup tinggi, sehingga memerlukan penanganan yang sistematis, terpadu, dan terkoordinasi. Potensi penyebab bencana diwilayah negara kesatuan Indonesia dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) jenis bencana, yaitu bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial.

Bencana bagian dari musibah yang seringkali tidak dapat diprediksi oleh siapapun juga. Manusia hanya mempunyai kemampuan terbatas, sehingga datangnya bencana diluar dugaan dan nalar dari manusia. Akan tetapi, peristiwa bencana yang terjadi berulang-ulang kali memerlukan berbagai langkah-langkah tindakan

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustino Leo, 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Penerbit CV. Alfabeta Bandung.
- Agostiono, (2010). Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter Dan Van Horn, Rajawali Press, Jakarta,
- Amiruddin Suwaib, 2012, *Kebijakan Dapat Lahirkan Konflik*, Sosiolog dari Untirta (Universitas Sultan Ageng Tirtayasa) <http://radarbanten.com/newversion/utama/6756-kebijakan-dapat-lahirkan-konflik.html>
- Darwin Muhadjir, 2006. *Proses Kebijakan, Pelatihan Analisis Kebijakan Publik (Pontianak-Kalimantan Barat)*. Magister Studi Kebijakan UGM, Yogyakarta.
- Dunn N. William, 1999, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, 2003, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Edisi Kedua, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Dye R. Thomas, 1992, *Understanding Public Policy (Seventh Edition)*, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey 07632.
- Gurr, Robert, Ted, 1980, *Handbook of Political Conflict, Theory and Research*, New York, The Free Press
- Islamy M. Irfan, 2004, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Jones O Charles, 1994, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Rajawali Press, Jakarta,

- Lubis, M. Solly, 2007. *Kebijakan Publik*, Bandung : CV. Mandar Maju.
- Nurcholis Hanif, 2005. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Penerbit PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta
- Nugroho, Riant. (2011). *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*. Jakarta: Pt Elex Media Komputindo.
- Parson Waynes, 2005. *Public Policy : Pengantar Teori dan Praktik analisis Kebijakan*, Kencana, Jakarta.
- Perwanto Agus. No.10-15 *Belajar dari Kasus Ranperda KWTE Kabupaten Bintan*. Available at <http://batampos.co.id/Proses-Pengambilan-Kebijakan.html>.
- Santoso Purwo & Nur Azizah, 2010, *Kebijakan Publik & Good Governance*. Bahan Ajar Kuliah, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Syamsuddin Haris, 1998. *Pola dan Kecenderungan Konflik Partai Masa Orde Baru*. Analisa, No.5/Th.XVII/Mei 1998. Artikel
- Sabatier, Paul. (1986). "Top Down And Bottom Up Approaches To Implementation Researchjournal Of Public Policy 6, (Jan),
- Santoso Amir, 1988, *Analisis Kebijakan Publik, Suatu Pengantar*, Jurnal Ilmu Politik 3, Jakarta, Gramedia.
- Schroder. Peter, 2003, *Strategi politik*. Jakarta: Friedrich-Naumann-Stiftung.

- Surbakti Ramlan, 2007, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta, Grasindo.
- SUAIB, Rahmat; LA SUHU, Bakri; PORA, Rasid. *Konflik Sengketa Tanah Bandara di Wilayah Tarakani*. 2022.
- Subarsono, 2006. *Analisa Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sudibyakto, 2010, *Kebijakan dalam Situasi Darurat Bencana*. Bahan Ajar Kebijakan Publik & Good Governance. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Wahab Abdul, Solichin, 2001 & 2002 (Edisi Revisi), *Analisis Kebijaksanaan : Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Winarno Budi, 2002, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Penerbit Media Pressindo, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_ 2008, *Kebijakan Publik, Teori dan Proses*. Edisi Revisi, Penerbit MedPress, Yogyakarta.
- Widodo Joko, 2009, *Analisis Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasi, Analisis Proses Kebijakan Publik*, Penerbit Bayumedia Publishing, Malang
- Wibawa, Samodra, Yuyun Purbokusumo dan Agus Pramusinto, 1994, *Evaluasi Kebijakan Publik*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Yeremias T. Keban, 1994, *Pengantar Administrasi Publik*, Modul Untuk Matrikulasi Administrasi Publik, MAP UGM, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, 2004, *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik (Konsep, Teori dan Isu)* Gava Media, Yogyakarta.

Undang-Undang (UU) Nomor 24 tahun 2007 Tentang  
Penanggulangan Bencana

## TENTANG PENULIS



**Bakri La Suhu, S.IP, M.A,** Lahir di Pulau Obi khususnya Desa Mano Kecamatan Obi Selatan Kabupaten Halmahera Selatan pada tanggal 14 Mei 1985. Menamatkan jenjang Pendidikan Dasar pada SD Negeri Mano-Obi Selatan Tahun 1998, MTs Alkhairaat Mano-Obi Selatan Tahun 2001, MAN Model Ternate

Tahun 2004. Menyelesaikan pendidikan tinggi Strata Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Maluku Utara Tahun 2008 dan melanjutkan Program Magister (S-2) Jurusan Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta (2010-2011).

Pada tahun 2012, penulis kembali mengabdikan sebagai Dosen dan kemudian tahun 2013 diangkat sebagai Dosen Tetap pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Maluku Utara. Tahun 2018 hingga sekarang, penulis dipercayakan untuk menduduki jabatan sebagai Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Program Magister Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Maluku Utara. Menikah dengan Ida Kene, Amd.Keb dan dikaruniai tiga orang anak (Muhammad Fadlan B. La Suhu, Citria Vidia Putri Hi. La Suhu dan Muhammad Zhafran Hi. La Suhu).

Beberapa artikel tulisan yang pernah di public baik jurnal Internasional terindeks Schopus yakni; *Elite Conflict on Power Contestation of Internal Political Party* (2018), *Study On Elite Configuration In Obi Regency Extension Of North Maluku* (2018). Sedangkan pada jurnal nasional yakni; *Partisipasi Pemilih Pemula Dalam Menentukan Pilihan Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah Maluku Utara* (2019), *Intervensi Swasta dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Desa Madapolo Kabupaten Halmahera Selatan*, (2019), *REFUGEE AND LAND DISPUTE (A Case Study at Gamsungi and Tosoa Villages, South Ibu District, Regency of West Halmahera, Year 2015)* (2019), *SOCIAL CONFLICTS IN CHURCH DEVELOPMENT IN KECAMATAN IBU SELATAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT (Study of Conflict Resolution among Citizens in Church Development In Adu Village)* (2019), *Peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dalam Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Di Wilayah Provinsi Maluku Utara* (2020), *Persepsi Politik Masyarakat Dalam Pembentukan Daerah Otonomi Baru Wasile Raya Di Kabupaten Halmahera Timur: Studi Desa Loleba Kecamatan Wasile Selatan* (2020), *Covid-19 Dan Ancaman Keselamatan Warga Negara* (2021), *Benang Kusut BLT Dana Desa Tahun 2020 di Pulau Gamumu Kecamatan Obi Selatan (Studi tentang Implementasi Pembagian BLT-DD di Desa Mano)* (2021), *FEKTIVITAS KERJA PEMERINTAH DESA DALAM PENYALURAN PROGRAM BERAS BAGI MASYARAKAT MISKIN (RASKIN) TAHUN 2016 (Studi Di Desa Gam Ici Kecamatan Ibu)* (2021), *Kebijakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah Istimewa Yogyakarta* (2022), *Peran Lurah Dalam Pengelolaan Dana Pembangunan Partisipatif Kelurahan (DPPK) Tahun 2017 DI Pulau Ternate (Studi Kantor Lurah Soa Kecamatan Ternate*



*Utara*) (2022), Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Talagamori Kecamatan Oba Kota Tidore Kepulauan (2022), dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Pembangunan Desa Tahun 2019 Di Desa Dama Kecamatan Loloda Kepulauan (2022). Article tersebut dapat ditelusuri pada google scholar ID QZOnpycAAAAJ, Sinta ID 6096386 dan Scopus ID 57205478258 serta Garuda 1029082.

Buku yang pernah penulis tulis yakni “KONFLIK PEREBUTAN RUANG HIDUP (Suatu Pendekatan Kebijakan & Konsensus) tahun 2021”, “KONSPIRASI ELIT Dibalik PEMEKARAN DAERAH” tahun 2022, “SENGKETA TAPAL BATAS di TANAH KESULTANAN” tahun 2022, “BATAS DAERAH Dalam PUSARAN KONFLIK” tahun 2022, GRAND DESIGN PELAYANAN KEPOLISIAN di WILAYAH KEPULAUAN” tahun 2022 dan “POTRET BURAM PEMERINTAHAN : Politik Birokrasi, Pelayanan Publik, Inovasi dan Konflik” tahun 2022, serta “Konflik Sengketa Tanah Bandara Di Wilayah Tarakani” tahun 2022. Pada tahun 2023, beberapa Buku yang pernah penulis tulis antara lain “PEMIMPIN IDEAL CATATAN UNTUK CALON KEPALA DAERAH”, “PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PETANI RUMPUT LAUT Di Wilayah Kepulauan” dan “PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) Konsep dan Aplikasi”.